

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang menjadi tujuan untuk dicapai dalam setiap kebijakan. Kepentingan-kepentingan nasional ini akan menimbulkan kerjasama ataupun menciptakan konflik antar negara. Sama halnya yang terjadi di dunia pada tahun 1939, dunia mengalami perang besar yang disebut perang dunia II,¹ yang merupakan bukti bahwa akibat adanya perbedaan paham dan kepentingan yang berbeda akan memicu terjadinya konflik bahkan perang besar. Hal ini yang terjadi ketika Jerman menduduki Polandia pada tahun 1939.²

Perang Dunia II berakhir pada tahun 1945, akibat perang ini banyak negara-negara yang mengalami kehancuran. Liga Bangsa Bangsa (LBB)³ yang saat itu menjadi lembaga perdamaian di dunia telah dianggap gagal menjalankan tugasnya untuk menjaga perdamaian. Untuk menjaga perdamaian setelah terjadinya perang besar dibutuhkan suatu organisasi internasional untuk menggantikan Liga Bangsa Bangsa. Organisasi yang mampu menjaga keamanan dan ketertiban dunia sehingga konflik-konflik yang terjadi dapat diminimalisir sehingga tidak berujung pada perang besar atau kemungkinan terjadinya perang

¹ Perang dunia II adalah sebuah perang yang melibatkan beberapa negara berlangsung mulai tahun 1939 sampai 1945. Perang ini melibatkan banyak sekali negara di dunia —termasuk semua kekuatan besar— yang pada akhirnya membentuk dua aliansi militer yang saling bertentangan. Dimulai ketika Hitler emnginvasi Polandia.

² Diakses dari Perang Dunia II <http://www.usmmm.org/outreach/id/article.php?ModuleId=10007681> pada 13 November 2012 pukul 18:46 WIB

³ LBB merupakan organisasi internasional yang didirikan setelah Konferensi Perdamaian Paris 1919, pada 10 Januari 1920. Fungsi-fungsi utamanya termasuk melucuti senjata, mencegah perang melalui keamanan kolektif, menyelesaikan pertentangan antar negara melalui negosiasi dan diplomasi, serta memperbaiki kesejahteraan hidup global.

dunia ketiga. Winston Churchill yang merupakan Perdana Menteri Inggris saat itu bersama Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt mengadakan pembicaraan khusus yang pada akhirnya menghasilkan deklarasi tentang hak kebebasan, kemerdekaan dan perdamaian dunia. Hal inilah yang menjadi langkah awal terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).⁴

PBB dibentuk pada tahun 1945. PBB memiliki 6 organ utama yaitu *a General Assembly* (Majelis Umum), *a Security Council* (Dewan Keamanan), *an Economic and Social Council* (Dewan Ekonomi dan Sosial), *a Trusteeship Council* (Dewan Perwalian), *an International Court of Justice* (mahkamah internasional) dan *a Secretariat* (Sekretariat). Dua organ utama PBB yang memiliki peran penting dalam mengambil kebijakan terhadap suatu konflik adalah Majelis Umum dan Dewan Keamanan.

Majelis Umum (MU) menempati posisi sentral sebagai pimpinan dalam musyawarah PBB. Terdiri dari semua anggota PBB yaitu 193 negara, MU menyediakan sebuah forum diskusi multilateral yang membahas isu-isu internasional yang dicakup dalam Piagam PBB yang disebut sidang umum (SU). Dalam sidang umum PBB biasanya dibahas mengenai pertanyaan yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan internasional (kecuali sengketa atau situasi yang sedang dibahas oleh Dewan Keamanan) namun MU bisa mengajukan rekomendasi pembahasan isu ke Dewan Keamanan.

Dalam hal peningkatan kerjasama internasional, MU juga melakukan studi dan membuat rekomendasi untuk pengembangan dan kodifikasi hukum internasional, realisasi hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan kerjasama

⁴ Dikutip dari Menelusik lebih jauh standar ganda PBB www.dakta.com/berita/nasional/749/menelusik-lebih-jauh-standar-ganda-pbb.html/ pada 14 November pukul 14:35 WIB

internasional di bidang ekonomi, sosial, kemanusiaan, bidang budaya, pendidikan dan kesehatan serta membuat rekomendasi untuk penyelesaian damai dari setiap situasi yang bisa merusak hubungan persahabatan antara negara-negara, menerima dan membahas laporan dari Dewan Keamanan dan badan-badan PBB, serta mempertimbangkan dan menyetujui anggaran PBB.⁵

Dewan Keamanan memiliki tanggung jawab utama untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dewan ini memiliki 15 anggota dengan 5 anggota tetap yaitu Rusia, Amerika Serikat, Perancis, Inggris, China dan 10 anggota tidak tetap. Di bawah Piagam PBB, semua negara anggota diwajibkan untuk mematuhi keputusan Dewan Keamanan. Dewan Keamanan memimpin dalam setiap hal baik mengambil keputusan ataupun dalam menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresif. Sesuai dengan ketentuan yang relevan dari piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, keputusan Dewan Keamanan akan sah jika dibuat oleh suara setuju dari lima anggota tetap DK (China, Prancis, Rusia, Inggris, Amerika Serikat) dan 4 anggota tidak tetap. Jika anggota tetap melemparkan suara negatif (menggunakan hak vetonya untuk menolak suatu rancangan), maka rancangan resolusi tidak dapat dilanjutkan.⁶ MU dapat mengambil alih penyelesaian suatu sengketa, jika DK PBB dianggap tidak mampu memberikan solusi.

Salah satu anggota tetap Dewan Keamanan yang memiliki peran besar di dalam penyelesaian beberapa kasus internasional adalah Rusia. Rusia merupakan pecahan dari Negara Uni Soviet yang runtuh pasca perang dingin dan memiliki

⁵ Dikutip dari *General Assembly* <http://www.un.org/en/ga/about/background.shtml> 15 Februari pukul 17:20 WIB

⁶ Dikutip dari *Security Council Vote* <http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/scvote.htm> pada 15 Februari 2013 pukul 17:42 WIB

hak istimewa, dimana hak istimewa ini mampu menjadi *power* bagi anggota tetap (dalam hal ini Rusia) untuk mengambil suatu kebijakan. Berikut tabel ringkasan penggunaan veto oleh Rusia dan anggota tetap DK PBB.

**Tabel 1. Ringkasan Penggunaan Hak Veto
Anggota tetap DK PBB, Periode 1993-2004**

Tahun	Draft	Agenda Sidang	Suara Negatif/ veto dari anggota tetap
2004	S/2004/313	Konflik Cyprus	Rusia
2004	S/2004/240	Situasi Timur tengah terkait pertanyaan Palestina	AS
2003	S/2003/990	Situasi Timur tengah terkait pertanyaan Palestina	AS
2003	S/2003/891	Situasi Timur tengah terkait pertanyaan Palestina	AS
2002	S/2002/1385	Situasi Timur tengah terkait pertanyaan Palestina	AS
2002	S/2002/712	Situasi Timur tengah terkait pertanyaan Palestina	AS
2001	S/2001/1199	Situasi Timur tengah terkait pertanyaan Palestina	AS
1999	S/1999/201	Situasi Timur tengah terkait pertanyaan Palestina	China
1997	S/1997/241	Situasi Timur tengah terkait pertanyaan Palestina	AS
1997	S/1997/199	Situasi wilayah yang diduduki Arab	AS
1997	S/1997/18	Amerika Tengah upaya menuju perdamaian.	China
1995	S/1995/394	Situasi wilayah yang diduduki Arab	AS
1994	S/1994/1358	Situasi di Republik Bosnia dan Herzegovina	Rusia
1993	S/25693	Konflik Cyprus	Rusia

Sumber : *An official United Nations veto list, covering 1946 to April 2004.*⁷

⁷ Dikutip dari *Official Documents System of the United Nations* <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/417/02/PDF/N0441702.pdf?OpenElement#page=19&zoom=83,0,319> pada 15 Februari 2013 pukul 19:07 WIB

Tabel diatas menunjukkan bahwa Rusia sebagai salah satu pemegang kekuasaan di DK PBB jarang menggunakan hak vetonya pasca perang dingin. Rusia terlihat hanya beberapa kali menggunakan vetonya untuk menolak rancangan resolusi yaitu pada tahun 1993,1994,2004 dan penggunaan veto lebih di dominasi oleh negara barat seperti Amerika Serikat.

Pada Desember tahun 2011 lalu, Rusia terlihat kembali menggunakan hak vetonya pada kasus Suriah. Konflik Suriah merupakan konflik yang terjadi antara masyarakat sipil, pihak oposisi dan pemerintah, di mana masyarakat sipil menuntut adanya sistem demokrasi di Suriah dan konflik ini merupakan bagian dari *Arab spring*⁸ yang lebih luas. Konflik yang terjadi di Suriah merupakan konflik terpanjang yang memakan korban jiwa paling besar jika dibandingkan dengan konflik-konflik *Arab Spring* sebelumnya. *Arab spring* Pertama kali terjadi di Tunisia, ketika warga sebuah kota kecil di selatan turun ke jalan untuk memprotes penyiksaan terhadap mahasiswa yang telah memasang graffiti anti-pemerintah. Pemerintah menanggapi aksi mahasiswa tersebut dengan kekerasan.⁹ Konflik Libya berawal ketika masyarakat sipil menginginkan Muammar Abu Minyar al-Qaddafi (Presiden Libya) untuk turun dari jabatannya karena dianggap terlalu otoriter, dalam kasus ini DK PBB mengeluarkan satu resolusi berupa sanksi terhadap Libya dan dilakukannya intervensi militer oleh AS, Inggris,

⁸*Arab spring* atau Musim Semi Arab mengacu pada pemberontakan demokratis yang muncul secara independen dan tersebar di seluruh dunia Arab tahun 2011. Gerakan ini bermula ketika terjadi konflik di Tunisia pada Desember 2010 dan dengan cepat menyebar ke Libya, Libanon, Yordania, Sudan, Arab Saudi, Mesir, dan yang terakhir terjadi di Suriah

⁹ Dikutip dari Suriah

<http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/syria/index.html> pada 28 September 2012 pukul 10:38 WIB

Perancis, Italia dan sekutu NATO lainnya.¹⁰ Revolusi yang terjadi di Libanon dan Yordania berjalan cukup damai berbeda dengan Libya dan Suriah.

Salah satu kasus *Arab spring* yang diangkat dalam sidang DK PBB yang mendapat perhatian besar dari Rusia adalah Suriah karena Rusia dengan tegas dan konsisten menolak intervensi pihak asing di Suriah. Konflik ini berawal dari penolakan terhadap rezim Al-Assad oleh masyarakat sipil atas dasar sikap Presiden Al-Assad yang dianggap otoriter dan tidak memenuhi janji seperti yang telah dijanjikan ketika kampanye pemilihan Presiden.

Situasi yang memanas di Suriah pada awal tahun 2012 lalu, terutama di kota Zabadani, Homs, Idleb dan Hama, semakin memburuk dimana korban rakyat sipil semakin meningkat sementara akses bantuan kemanusiaan masih tetap sulit. Disamping itu, jumlah *internally displaced persons* (IDPs) dan pengungsi Suriah juga semakin meningkat.¹¹ Hal ini membuat Dewan Keamanan perlu untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya untuk meminimalisir kemungkinan meluasnya konflik tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan DK PBB, Rusia telah memveto tiga resolusi Dewan Keamanan yang ditujukan kepada Suriah, dan menegaskan perlunya resolusi yang dipimpin Suriah untuk mengatasi krisis negara itu tanpa campur tangan pihak asing.¹² Salah satu penolakan Rusia dilakukan pada tanggal 04 April 2012 ketika Maroko mengajukan rancangan resolusi terkait pengiriman militer asing ke wilayah Suriah dan dengan tegas

¹⁰ Dikutip dari NATO Petik Pelajaran Penting dalam Misinya di Libya <http://www.voaindonesia.com/content/nato-petik-pelajaran-penting-dalam-misinya-di-libya-132272848/99712.html> pada 17 Februari 2013 pukul 14:07 WIB

¹¹ Laporan Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata.2012.*Konflik Suriah*.Kementerian Luar Negeri Indonesia

¹² Dikutip dari Rusia terus jual senjata ke Suriah <http://www.voaindonesia.com/content/rusia-terus-jual-senjata-ke-suriah/1602761.html> pada 15 Februari 2013 pukul 19:41 WIB

ditolak oleh Rusia. Pembahasan ini menjadi menarik ketika melihat sejarah penggunaan veto Rusia, dimana Rusia kembali menggunakannya dalam kasus Suriah setelah sekian lama Rusia lebih sering sejalan dengan anggota lainnya (dengan memberikan suara positif ataupun abstain), serta sikap tegas Rusia yang tidak menginginkan adanya intervensi militer pihak asing di Suriah.

1.2. Perumusan Masalah

Arab spring adalah gelombang pergolakan yang terjadi di dunia Arab sejak tahun 2010 hingga saat ini, mulai dari konflik Tunisia, Mesir, Libanon, Yordania, Arab, Libya sampai yang terakhir adalah Suriah. Konflik ini adalah awal dari revolusi dunia Arab untuk menggulingkan kepemimpinan yang otoriter dan berakhir dengan kekerasan.¹³ Menurut Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa, konflik yang terjadi di Suriah tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan dan ekonomi di negara itu saja tapi sudah merembet menjadi konflik wilayah dengan sikap Suriah yang melanggar batas teritori.¹⁴ Ketika konflik internal sudah mulai mengancam kestabilan wilayah disekitarnya, DK PBB berhak untuk ikut dalam penyelesaian konflik dengan berbagai resolusi dan tindakan untuk meminimalisir meluasnya konflik tersebut. Pada sidang DK PBB April 2012 lalu, DK gagal mengeluarkan resolusi untuk Suriah karena suara negatif dari Rusia.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Apa yang menjadi kepentingan Rusia dalam kasus ini sehingga Rusia kembali menggunakan vetonya?

¹³ Apriadi Tamburaka, 2011, *Revolusi Timur Tengah*. Yogyakarta: Narasi. hlm 9-10

¹⁴ Dikutip dari konflik Suriah

<http://teknokompas.com/read/2012/10/10/14424265/konflik.suriah.835.wni.sudah.dipulangkan> pada 17 Februari 2013 pukul 14:50 WIB

1.4. Tujuan Penelitian

- a. untuk menganalisa kiprah Dewan Keamanan dalam penyelesaian sengketa internasional
- b. untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait kepentingan apa yang dimiliki Rusia sebagai anggota tetap DK PBB dalam menyikapi situasi di Suriah.
- c. Untuk mengetahui kepentingan nasional yang dimiliki Rusia sebagai anggota tetap DK PBB di dalam menyikapi kasus Suriah.

1.5. Manfaat Penelitian

Menambah dan memperkaya bahan referensi bagi akademisi dan mahasiswa Hubungan Internasional dalam hal Politik Internasional khususnya mengenai Kepentingan Rusia dalam konflik Suriah dengan memanfaatkan posisinya di Dewan Keamanan.

1.6. Tinjauan Pustaka

Dalam Jurnal Transnasional, Vol. 4, No. 1, Juli 2012 oleh Irdyanti dengan judul *Kebijakan Penolakan Rusia Terhadap Strategi Barat Di Suriah*, penulis menjelaskan alasan penolakan Rusia terhadap Barat dalam menyelesaikan konflik di Suriah. Namun pada jurnal ini, Irdyanti hanya memfokuskan pada sisi Rusia sebagai satu kesatuan negara tanpa melihat sisi DK dalam keanggotaannya di DK PBB. Selama penghujung tahun 2010 hingga awal 2012, kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah mengalami pergolakan politik yang luar biasa dikenal dengan "Jasmine Revolution". *Jasmine revolution* adalah sebuah revolusi yang menjalar cepat menggoncangkan stabilitas politik di negara-negara

Timur Tengah. (di beberapa artikel lain Jasmine revolution disebut sebagai *Arab spring*).

Revolusi ini berawal dari pergolakan rakyat di Tunisia, lalu menyebar ke Mesir, Aljazair, Yaman, Bahrain, Libya dan terakhir terjadi di Suriah. Dalam revolusi Jasmine tersebut, dua orang pemimpin meninggalkan jabatannya dan melarikan diri, yaitu mantan Presiden Tunisia Zine Abidin Ben Ali dan mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak, sedangkan pemimpin negara lainnya belum dipastikan karena kondisi politik di negara yang masih bergolak. Salah satu negara yang masih bergolak dan menjadi sorotan dunia atas jumlah korban jiwa yang banyak dalam revolusi ini adalah Suriah.

Suriah sedang mengalami gejolak politik di mana rakyatnya menuntut mundur Presiden Bashar al-Assad. Tuntutan rakyat Suriah di latar belakang oleh keberhasilan perjuangan rakyat Tunisia, Mesir, dan Libya yang berhasil menuntut mundur rezim otoriter di ketiga negara tersebut. Tuntutan ini merupakan akumulasi dari ketidakpuasan rakyat Suriah terhadap pemerintahan Assad yang dianggap otoriter. Bashar al-Assad telah berkuasa sejak tahun 2000, mewarisi kekuasaan ayahnya Hafez al-Assad, yang berkuasa selama tiga dekade di Suriah.

Penulis menjelaskan bahwa konflik ini memicu negara barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa memberikan sanksi kepada Suriah sebagai bentuk ancaman kepada Suriah. Penulis juga menjelaskan bahwa tindakan Rusia menggunakan hak veto tersebut dilihat sebagai bentuk dukungan yang besar terhadap Suriah, khususnya selama unjuk rasa anti rezim Presiden Bashar Al-Assad pada awal tahun 2011.

Kebijakan Penolakan Rusia Terhadap Strategi Barat di Suriah dikarenakan Rusia ingin mencegah hegemoni negara Barat di Timur Tengah khususnya Suriah dengan menjaga keseimbangan kekuasaan dan mengamankan kebijakan politik luar negeri Rusia yang otonom. Jurnal ini menjelaskan bahwa dukungan yang diberikan Rusia kepada Suriah juga dilatarbelakangi beberapa faktor pertama, Rusia juga tidak ingin mengulang kesalahan dengan memberikan jawaban abstain seperti ketika resolusi yang dirancang untuk Libya, sehingga resolusi tersebut akhirnya disalahgunakan oleh NATO untuk melegalkan serangannya di Libya. Kedua, Suriah merupakan salah satu mitra dagang terbesar Rusia. Sehingga Rusia berusaha melindungi asset-asetnya. Faktor terakhir yang mempengaruhi kebijakan Rusia terhadap Suriah adalah Rusia lebih memilih perwakilan PBB, yaitu Kofi Annan sebagai perantara diplomasi atas konflik Suriah.

Dalam artikelnya “Membaca Konflik Suriah”, Muhammad Fakhry menjelaskan bahwa apa yang terjadi di Suriah sama seperti yang terjadi di negara Timur Tengah lainnya. Suriah adalah negara yang juga dipengaruhi oleh badai revolusi. Iklim politik Suriah menjadi lebih panas setelah pemerintah melakukan operasi militer di beberapa kota termasuk di Khalidiyah, Homs provinsi, yang telah menewaskan ribuan orang. Kekejaman yang dilakukan pemerintah Suriah adalah mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi terhadap Suriah. Namun, resolusi gagal setelah China dan Rusia menolak. Suhu politik di Suriah pun semakin memanas setelah pemerintah melakukan operasi militer di beberapa kota termasuk di wilayah Khalidiyah provinsi Homs yang telah menewaskan ribuan orang.

Kekejaman yang dilakukan pemerintah pemerintah Suriah tersebut mendorong PBB melalui dewan keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi terhadap Suriah. Namun, resolusi tersebut gagal setelah Cina dan Rusia menolaknya. Sementara itu, negara-negara Barat seperti AS, Perancis dan Inggris menyatakan bahwa pemerintah Suriah tidak lagi sah dan menuntut Presiden Assad melepaskan jabatannya. Reaksi internasional tersebut ditanggapi oleh pihak oposisi di Suriah dengan membentuk Dewan Nasional Suriah sebagai wadah pemersatu bagi gerakan oposisi Suriah termasuk gerakan oposisi terbesar Ikhwanul Muslimin.

Dewan Nasional Suriah yang sejak semula bertujuan untuk menggalang aspirasi kelompok oposisi belum sepenuhnya berfungsi malah semakin menemui banyak rintangan. Penulis juga mengatakan bahwa di dalam negeri, pemerintah Bashar Al-Assad didukung oleh Rusia dan China untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok oposisi.

Kedua Jurnal hanya membahas kepentingan Rusia sebagai satu kesatuan negara dalam konflik Suriah tanpa melihat faktor dari keberadaan Rusia di dalam Dewan Keamanan dan hanya menjelaskan apa yang terjadi dalam konflik Suriah.

1.7. Kerangka Teori

Berikut teori dan konsep yang akan digunakan dalam menganalisa permasalahan dan menjawab pertanyaan penelitian dalam penelitian ini :

a. Kepentingan nasional (*National Interest*)

Kepentingan nasional merupakan gabungan deklarasi dari nilai-nilai hadiah kemerdekaan bangsa, kebebasan dan keamanan. Kepentingan nasional biasanya dinyatakan dalam hal kemakmuran ekonomi dan kedaulatan politik.¹⁵ *National Interest* juga bisa diartikan secara harfiah sebagai ketertarikan nasional, yang berarti apa yang suatu negara tersebut inginkan atau butuhkan, *National interest* pada hakikatnya adalah suatu konsep yang sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku suatu negara dalam pengambilan setiap kebijakannya. Konsep *national interest* merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu negara.¹⁶

Dapat disimpulkan teori kepentingan nasional berusaha menjelaskan bahwa suatu negara dikatakan berhasil mencapai kepentingan nasionalnya ketika negara mampu memenuhi kebutuhan negaranya. Dengan pencapaian tersebut kestabilan ekonomi politik dan sosial suatu negara bisa dipastikan berjalan dengan maksimal, lalu kepentingan nasional inilah yang menjadi dasar dan pengaruh dalam pengambilan kebijakan suatu negara.

Penelitian ini terdiri dari dua aspek penting yaitu aspek ekonomi dan aspek keamanan militer. Aspek ekonomi pada setiap kebijakan yang diambil oleh suatu negara, pasti bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negara yang diartikan sebagai kepentingan nasional

¹⁵ Dikutip dari <http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdf/files/pub356.pdf> pada 14 November pukul 14:38 WIB

¹⁶ Dikutip dari http://fikriffhier-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-61398-Umum-Definisi%20Tujuan,%20dan%20motivation%20maker%20Kepentingan%20nasional.html 23 Januari 2013 pukul 13:27 WIB

(*national interest*). Suatu kepentingan nasional dalam aspek ekonomi diantaranya adalah untuk meningkatkan keseimbangan kerjasama suatu negara dalam memperkuat sektor industri dan sebagainya.¹⁷

b. Organisasi Internasional

Politik dunia memiliki keragaman pemain. Kuncinya adalah tidak semua yang merupakan aktor utama, namun yang menjadi penting bagaimana mereka berinteraksi untuk menghasilkan tatanan dunia sesuai tujuan bersama. Salah satunya adalah Organisasi Internasional, faktor utama dalam pertumbuhan Organisasi Internasional sebagai pemain dalam hubungan internasional adalah kemampuan untuk mempolitisasi isu lintas-negara di bawah otoritas negara.¹⁸ Sebagai aktor non-negara, walaupun, OI beroperasi dalam sistem antarnegara dari kekuatan-kekuatan besar pasca-Perang Dingin, predominasi AS dan kebangkitan eksepsionalisme Amerika setelah serangan teroris 11 September 2001, aktor non-negara telah dimanfaatkan sebagai unsur pokok dari negara-negara berdaulat.¹⁹ Peran OI sebagai actor dalam hubungan internasional sangat berpengaruh pada perkembangan tatanan dunia dan kestabilan sistem internasional.

PBB merupakan salah satu organisasi internasional yang memiliki tugas untuk melindungi umat manusia dari bahaya ancaman perang, dan piagam PBB memuat ketentuan-ketentuan secara terperinci mengenai pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Tujuan PBB jelas untuk menjaga perdamaian dunia, sehingga PBB diharapkan mampu

¹⁷ Daniel S.Papp. "*Contemporary International Relation*" : A framework for understanding, *Second Editions*. New York: MacMillan Publishing Company, 1988 hlm 29

¹⁸ Richard Devetak, Anthony Burke, Jim George. 2007. *An Introduction to International Relation: Australia Perspectives*. New York: Cambridge University Press. hlm 280

¹⁹ *Ibid.* hlm 281

menyelesaikan setiap permasalahan dan konflik yang ada secara efektif dan semaksimal mungkin jauh dari tindak kekerasan atau invasi ke suatu negara ataupun wilayah. Hal ini juga dimuat dalam pasal 2 ayat 3 bab VI dan bab VIII. Serta pasal 2 ayat 4 piagam, menegaskan agar PBB tidak menggunakan ancaman atau kekerasan.

Pada tahapannya, penyelesaian konflik harus dilakukan DK PBB sesuai aturan yang berlaku, tahap pertama negosiasi kemudian jasa-jasa baik (pihak ke-3) , penyelidikan, konsiliasi, dan arbitasi.²⁰ DK PBB sebagai badan PBB tertinggi dituntut untuk bisa menjadi badan perdamaian dunia, ketika ada suatu konflik yang terjadi dalam suatu Negara dan tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah, DK PBB punya kewajiban untuk ikut campur menyelesaikan permasalahan tersebut.

c. Teori realisme politik internasional

Dalam bukunya yang berjudul *Politics among Nations “ The Struggle for Power and Peace”*, Hans J Morgenthau memberikan asumsi bahwa Politik internasional seperti semua politik, adalah perjuangan untuk kekuasaan, apapun tujuan akhir dari politik internasional, kekuasaan selalu menjadi tujuan langsung. Teori realisme politik internasional adalah penjelasan atau analisa kepada siapa yang akan menjadi aktor. Teori ini berbicara mengenai perilaku negara sebagai aktor dalam politik internasional dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku negara tersebut.

²⁰ Sumaryo Suryokusumo.1990.*Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia

Teori ini membantu penulis untuk menjelaskan bagaimana Rusia berperan di Dewan Keamanan PBB dimana setiap anggota DK PBB harus mendahulukan kepentingan dunia walaupun pada kenyataannya setiap negara dalam mengambil suatu tindakan setiap negara akan dipengaruhi oleh kepentingan nasionalnya masing-masing.

1.8. Alur Pemikiran



1.9. Asumsi

Dewan Keamanan PBB merupakan organisasi yang memiliki kewajiban langsung dalam hal menjaga perdamaian internasional dengan mengedepankan kepentingan bersama sesuai dengan piagam PBB.

Suriah merupakan bagian dari Arab spring yang terjadi di Timur Tengah, sipil menuntut agar presiden Al-Ashad turun dari jabatannya karena dianggap terlalu otoriter dalam memimpin Suriah

Rusia tidak melakukan hal yang sama untuk mem-veto resolusi ketika pengambilan keputusan dalam kasus Libya, dimana NATO melakukan intervensi militer ke Libya.

1.10. Metode Penelitian

1.10.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis kualitatif, Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.²¹

1.10.2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer. Data primer adalah yang diperoleh peneliti secara langsung sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Primer itu contohnya kelompok fokus ataupun data hasil wawancara sedangkan data sekunder bisa didapatkan dari literatur ataupun penelitian-penelitian sebelumnya

1.10.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan

²¹ Dikutip dari Penelitian kualitatif <http://www.penalaran-unm.org/index.php/artikel-nalar/penelitian/116-metode-penelitian-kualitatif.html> pada 19 Februari 2013 pukul 12:08

mengidentifikasi gagasan maupun ide-ide yang ada di dalam literature tersebut untuk dijadikan suatu argument.

1.10.4. Teknik Analisa Data

Karena data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, maka teknik analisisnya digunakan dengan menganalisa hasil wawancara yang sudah ada untuk dijadikan sebuah argumen yang menjadi sumber data dan mengumpulkan fakta-fakta dari literatur-literatur sebagai data pelengkap.

1.11. Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan : Latar belakang masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian

BAB II. Gambaran umum mengenai Kiprah DK PBB dalam berbagai sengketa Internasional dan veto Rusia terkait konflik Suriah

BAB III. Analisa kepentingan Rusia sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB dalam pengambilan keputusan terkait situasi Suriah Periode 2011-2012

BAB IV. Kesimpulan